

	News Title : Bappebti Terbitkan Aturan Baru, 383 Aset Kripto Dapat Diperdagangkan	
	Media Name : Sindonews.com	Journalist : Advenia Elisabeth
	Publish Date : 15 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 300,000
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 100,000
	Section/Rubrication : Bursa Finansial	Topic : kripto

Bappebti Terbitkan Aturan Baru, 383 Aset Kripto Dapat Diperdagangkan

Advenia Elisabeth · Senin, 15 Agustus 2022 · 20:18 WIB



Koran: Menteri Perdagangan (Mendag) Jerry Sambuaga. Pictet

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fiskal aset kripto.

Hal itu terdapat dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fiskal Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Perba Nomor 7 Tahun 2020.

Dengan terbitnya Perba yang baru, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fiskal aset kripto dan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Wakil Menteri Perdagangan (Wimendag) Jerry Sambuaga mengatakan, terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia.

"Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Transaksi Kripto Capai Rp459 Triliun, Bappebti Perketat Pengawasan

Sebelumnya, sambung Wimendag, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan hanya berjumlah 229 jenis.

Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, maka daftar aset kripto yang diperdagangkan disusun untuk disesuaikan.

Penyesuaian dilakukan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan delisting jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP).

Jerry menyebut, Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan whitepaper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis distributed ledger technology dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP.

"Tertanya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," imbuh Didid.

Baca juga: AS Khawatir Peningkatan Pencucian Aset Kripto untuk Daniel Nukhr Komt

Kemudian, dia menerangkan bahwa Perba yang baru ditetapkan itu juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.

"Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha. Sehingga, proses penilaian akan lebih cepat dan akurat," terang dia.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fiskal aset kripto yang akan melakukan listing atau delisting jenis aset kripto yang telah ditetapkan, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

"Dengan tingginya minat masyarakat yang berinvestasi di bidang perdagangan fiskal aset kripto, masyarakat diminta agar terlebih dahulu paham dengan benar produk dan mekanisme perdagangannya," tegas Didid.

Pertama, dia menyarankan, masyarakat harus menjadi pelanggan pada perusahaan yang memiliki tanda daftar dari Bappebti.



Kedua, memastikan dana yang digunakan adalah dana lebih yang dihasilkan secara legal dan bukan dana yang digunakan kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, menginvestasikan dana untuk jenis produk yang telah ditetapkan Bappebti. Keempat, mengelola risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga komoditi yang terjadi karena harga yang fluktuatif. Terakhir yakni pantang percaya janji-janji keuntungan tinggi atau tetap.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas CPTAK dan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fiskal aset kripto dengan mengakses situs resmi Bappebti di tautan <https://www.bappebti.go.id/>," tutup Didid.